



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : RACHMAD SOLIK
2. Jabatan : DIREKTUR INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI
3. NHK : 128981

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **2.290.147.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.073.427.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/54 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 116.720.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 87 m2/175 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** **Rp.** **334.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
3. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
5. MOBIL, HONDA AVANZA AVANZA 1.3 G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000



6. MOBIL, TOYOTA AVANZA AVANZA 1.3 G Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000

7. MOTOR, YAMAHA AEROX MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 602.415.099

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.226.562.099

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.226.562.099

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.